



Kanwil DJP Nusa Tenggara Peringati Hari Pajak

Peran penting pajak sebagai komponen utama penerimaan negara, untuk mendukung terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan di seluruh pelosok tanah air, perlu ditandai dengan penetapan satu hari sebagai hari Pajak. Hari Pajak yang jatuh pada tanggal 14 Juli merupakan momentum penting dalam sejarah perjalanan organisasi perpajakan di Indonesia pada masa awal pasca proklamasi kemerdekaan yang mengandung nilai luhur dan semangat perjuangan untuk menopang kehidupan bangsa Indonesia.

Dalam rangka penghormatan terhadap sejarah perjuangan bangsa, menguatkan jati diri organisasi Direktorat Jenderal Pajak, serta memotivasi pengabdian para pegawai Direktorat Jenderal Pajak kepada tanah air Indonesia, perlu menetapkan tanggal 14 Juli 1945 sebagai Hari Lahir Pajak, seperti diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-313/PJ/2017 tentang Penetapan Hari Pajak.

Latar belakang penetapan hari Pajak dimulai ketika Arsip Nasional Republik Indonesia pada September 2017 membuka secara terbatas dokumentasi dokumen otentik BPUPKI-PPKI koleksi AK Pringgodigdo yang dirampas Belanda (Sekutu) ketika masuk Yogyakarta dan menangkap Bung Karno pada 1946. Penelusuran dokumen Pringgodigdo yang baru dibuka menunjukkan bahwa sejarah pajak dan negara ternyata berkait dengan proses pembentukan negara, yaitu masa-masa sidang BPUPKI. Bahkan kata pajak itu pertama kali disebut oleh Ketua Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Radjiman Wediodiningrat dalam suatu sidang panitia kecil soal “keuangan” dalam masa reses BPUPKI setelah pidato terkenal Sukarno dibacakan pada 1 Juni 1945. Rajiman dari lima usulannya pada butir keempat menyebut, “Pemungutan pajak harus diatur hukum”. Kata pajak muncul dalam “Rancangan UUD Kedua” yang disampaikan pada 14 Juli 1945 pada Bab VII HAL KEUANGAN – PASAL 23 menyebutkan pada butir kedua: “Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-Undang”. Sejak 14 Juli 1945 itulah urusan pajak terus masuk dalam UUD 1945. Bahkan mendapat pembahasan khusus pada 16 Juli 1945 yang merincinya sebagai sumber-sumber penerimaan utama negara dan menjadi isu utama sidang.

Untuk pertama kalinya Hari Pajak diperingati di tahun 2018, dan diisi dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan secara serentak di seluruh unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak, seperti upacara bendera, kegiatan sosial pajak peduli, dan donor darah. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan kepedulian pegawai DJP kepada sesama untuk berbagi, serta ucapan syukur kepada Tuhan YME.

Hari Pajak Tahun 2018 mengambil tema “Wujudkan Indonesia Sadar Pajak”, mengajak rakyat Indonesia untuk menumbuhkan rasa patriotisme dengan membayar pajak. Patriotisme tidak hanya diperlukan saat membebaskan negeri ini dari penjajah, tetapi juga diperlukan untuk memastikan keberlangsungan Negara Kesatuan RI dalam mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kepala Kantor,

ttd

Suparno

NIP 19680520 199503 1 003